

Judul : Setiap uang negara yang dikorupsi harus segera dikembalikan ke negara
Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Setiap Uang Negara Yang Dikorupsi Harus Segera Dikembalikan Ke Negara

Setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (20/10/2026), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat diberitakan telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi.

Namun, sehari setelah itu, Luhut kembali meluruskan pernyataannya. Dia menegaskan, uang negara yang disewelengkan tetap harus dikembalikan. Usulannya bukan menghapus pertanggungjawaban, melainkan memperjelas pembuktian agar penegakan hukum lebih pasti dan objektif.

Luhut memastikan, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang disewelengkan tetap harus dikembalikan.

Meski Luhut sudah memberikan klarifikasi terbaru, diakusi soal perlunya meredefinisi korupsi menjadi topik perbincangan hangat antara wakil rakyat di Senayan, dengan para penggiat anti korupsi.

Sebelumnya, usulan tersebut merupakan hasil kajian DEN yang

merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

"Ya, itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi, tidak bicara kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Luhut menyebut Presiden Prabowo juga menyetujui usulan

tersebut.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting supaya penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional," jelasnya.

Menurut Luhut, Indonesia selama ini menerapkan unsur kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. "Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan, seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya.

Menanggapi wacana tersebut,

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan, usulan itu perlu dicermati dan dikaji secara hati-hati. Sementara itu, Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badul Hadi menilai, kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Rudianto Lallo dan Badul Hadi mengenai usulan agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi, berikut wawancara selengkapnya.

BADIUL HADI, Manajer Riset FITRA

Jangan Buka Celah Pejabat Untuk Korupsi



Apakah anda setuju korupsi perlu dilakukan definisi ulang atau diperbaiki?

Saya melihat persoalannya bukan apakah definisi korupsi perlu diperbaiki, melainkan siapa yang dituntut dan siapa yang berisiko dirugikan. Jangan sampai dalih kepastian hukum bagi pengambil keputusan justru mempersempit ruang negara untuk menindak penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Anda, apakah kerugian negara merupakan bagian dari korupsi?

Kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apa dampaknya jika definisi korupsi ini berubah?

Jangan sampai perubahan definisi justru membuka celah bagi pejabat

untuk berlindung di balik keputusan bisnis. Risiko usaha adalah satu hal, sedangkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara adalah hal lain.

Bagaimana tanggapan Anda dengan kategorisasi korupsi versi UNCAC?

Indonesia tidak boleh memahami UNCAC secara sepotong-sepotong demi membenarkan pelanggaran hukum. Standar internasional seharusnya menjadi pijakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, bukan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pengelola kekayaan publik. Harmonisasi hukum harus memperkuat akuntabilitas, bukan melemahkannya.

Bagaimana jika dilihat dari perspektif pengelolaan aset negara?

Dalam konteks pengelolaan aset

negara, kepastian hukum memang penting agar keputusan investasi tidak selalu dibayangi kriminalisasi.

Namun, kepastian hukum tanpa transparansi, audit independen, dan penegakan aturan terkait konflik kepentingan justru dapat mengubah perlindungan hukum menjadi perlindungan bagi elite.

Apa harapan Anda?

Saat ini, reformasi yang dibutuhkan bukan mempersempit definisi korupsi, melainkan memperjelas batasan antara kerugian bisnis yang wajar, kelalaian, dan kesengajaan menyalahgunakan kekuasaan.

Uang negara bukan milik penguasa. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada publik, dan setiap perubahan hukum harus menjamin kepentingan publik tetap terlindungi. ■ REN

RUDIANTO LALLO, Anggota Komisi III DPR RI

Gerak Penegak Hukum Jangan Dipersempit



Bagaimana pandangan Anda terkait korupsi, apa perlu ada redefinisi baru?

Kita harus melihat persoalan ini dalam konteks kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai hari ini, korupsi masih menjadi persoalan serius dan masyarakat masih menaruh harapan besar kepada negara agar penanganannya dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu.

Jadi, yang harus kita sorot dari wacana korupsi itu apa?

Ketika muncul wacana untuk mempersempit definisi korupsi atau mengubah pendekatan penanganannya, hal tersebut harus dikaji secara hati-hati. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha justru mempersempit ruang gerak aparat penegak hukum dalam mengustut dan memberantas tindak pidana korupsi.

Selalu ada debat antara kerugian negara dan risiko bisnis dalam kasus korupsi, bagaimana ini?

Kita memang harus membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan perbuatan yang mengandung unsur pidana. Tidak setiap kerugian dalam pengelolaan perusahaan atau badan usaha milik negara (BUMN) otomatis merupakan korupsi.

Namun, jika kerugian negara terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, proses hukumnya harus tetap berjalan.

Jangan sampai alasan risiko bisnis dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik serta sesuai dengan ketentuan hukum juga tidak boleh menimbulkan keretakan berlebihan bagi para pengambil kebijakan.

Apa catatan Anda?

Indonesia saat ini memiliki sejumlah instrumen hukum untuk memberantas kejahatan korupsi, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, masyarakat juga terus mendorong penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Semangat yang harus kita bangun adalah memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, bukan justru melemahkannya. Instrumen hukum yang sudah ada harus dioptimalkan, koordinasi antarpenghak hukum diperkuat, dan aset hasil kejahatan harus disial dengan mekanisme hukum yang berlaku. ■ REN